

Judul : Bareskrim Selidiki Kasus Pagar Laut
Tanggal : Sabtu, 01 Februari 2025
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Bareskrim Selidiki Kasus Pagar Laut

- *Kejagung dalam pencopotan pegawai BPN.*
- *KKP sudah periksa nelayan dan kepala desa.*
- *Eks Ketua KPK laporkan pengusaha ke KPK.*

SITI YONA HUKMANA
redaksi@mediaindonesia.com

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) untuk menyelidiki persoalan pagar laut sejak awal Januari.

"Ketika mulai pemberitaan di awal Januari terkait dengan pagar laut Tangerang, kami diperintahkan Kapolri melalui Kepala Bareskrim Polri (Komjen Wahyu Widada) untuk melaksanakan penyelidikan," ucap Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, kemarin.

Dalam penyelidikan, kata dia, pihaknya sudah mengecek lokasi pagar laut dan mengumpulkan keterangan dari masyarakat di tempat kejadian

perkara (TKP). Termasuk menggali informasi perihal pemberian girik atau sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di laut. Setelah itu, imbuh Djuhandhani, pihaknya segera meminta keterangan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Termasuk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta kelurahan yang mengeluarkan SHGB yang telah dibatalkan. Namun, ia mengakui Bareskrim belum melakukan olah TKP lanjutan karena masih mengumpulkan keterangan.

Secara terpisah, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku telah melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) kabinet. "Setidaknya pagar laut aku laporan saja," ucapnya.

PERIKSA NELAYAN

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meminta keterangan

dari Kepala Desa Kohod dan 13 nelayan.

Di lain pihak, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan masih mendahulukan kerja-kerja yang dilakukan institusi terkait, dalam hal ini KKP maupun Kementerian ATR/BPN.

Salah satu yang dipantau oleh Kejagung, sambung Harli, ialah mengenai pencopotan enam pegawai ATR/BPN yang

menerbitkan sertifikat di atas laut. "Apakah konteksnya pemalsuan, tidak profesional dalam menjalankan jabatan, atau ada suap? Itu nanti yang kami lihat," jelasnya.

LAPORKAN PENGUSAHA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turutan dalam dugaan kongkalikong penerbitan SHGB dan sertifikat hak milik (SHM) di atas laut.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan hal itu saat melaporkan pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan. Abraham mengaku dalam laporan itu disertakan sejumlah bukti dan telah dilihat langsung oleh pimpinan komisi anti-rasuah, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanoto.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan pihaknya bakal mendalami aduan Samad. Menurutnya, KPK mencari sudut pandang yang berbeda dari penanganan di Kejagung.

Saat dihubungi, pihak kuasa hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid, menolak memberikan komentar terkait dengan pelaporan tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo mendesak aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan kongkalikong dalam penerbitan SHGB dan SHM di atas laut Banten. (Bob/Can/Fah/Tri/X-7)

Pemeriksaan dan Upaya Penyelesaian Kasus Pagar Laut di Tangerang

21 Januari 2025

Pemeriksaan terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRPF).

30 Januari 2025

- KKP memeriksa Kepala Desa Kohod beserta 13 nelayan.
- Kementerian ATR/BPN telah memberikan sanksi berat berupa pembebasan dan pemberhentian dari jabatan terhadap delapan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

31 Januari 2025

Kementerian ATR/BPN membatalkan 50 sertifikat (dari 263 sertifikat).

Dugaan Adanya Sertifikat Pagar Laut

- Ada 263 bidang, terdiri atas 254 bidang sertifikat HGB atas nama dua perusahaan dan 9 bidang atas nama perseorangan.
- Ada juga 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut.

Perusahaan yang Terlibat Kepemilikan Sertifikat HGB

- PT Intan Agung Makmur: 234 bidang
- PT Cahaya Inti Sentosa: 20 bidang

Sumber: BPN/KPK Kementerian ATR-BPN/Lib.ing.MI